

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH GAMPONG DAN TUHA PEUT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM DI GAMPONG BAKCIRIH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR

HIDAYATUL MUFID
NPP. 29. 0030

*Asdaf Provinsi Aceh
Program Studi
Politik Indonesia Terapan Fakultas Politik Pemerintahan*

Email:
29.0030@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The lack of coordination between the Gampong Government and Tuha Peut such as members of Tuha Peut rarely go to the office as a result, there is less face-to-face contact with the keuchik and supervision from the Gampong Government and Tuha Peut in the implementation of Islamic law is not perfect.

Purpose: to find out government communication between the Gampong Government and Tuha Peut in administering government based on Islamic law in Gampong Bakistrih and what factors hinder government communication between the Gampong Government and Tuha Peut in administering government in Gampong Bakgarish, Montasik District. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method then the sample technique used is purposive sampling. **Results:** government communication between the gampong government and Tuha Peut in the administration of government in Gampong Bakcarih, Montasik District, Aceh Besar Regency, namely by using the Malayau Hasibuan concept as in partnership, consultation, coordination, have shown good communication, it's just that Tuha Peut has not been optimal in accommodating the aspirations of the community, and also in the implementation of government programs there are still problems in development in the village. **Conclusion:** Government communication between the Gampong Government and Tuha Peut has been going well such as in making regulations, holding meetings, and in implementing Islamic law, but in the implementation of development it has not been well informed and also in the completeness of administrative meetings such as attendance has not been heeded properly. The factors that hinder government communication are facilities, communication patterns, not understanding the function and the absence of socialization from the Gampong government related to the Tuha Peut function. In order to improve government communication between the gampong government and Tuha Peut in the administration of government, it is recommended that an improvement in planning is needed so that no development will be delayed due to being rejected by the community and also the need for socialization of the duties and functions of Tuha Peut to the community so that governance runs well .

Keywords: *Government Communications, Gampong Government, Tuha Peut*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut seperti anggota Tuha Peut jarang ke kantor akibatnya tatap muka dengan keuchik berkurang dan juga pengawasan dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam pelaksanaan syariat islam belum optimal. **Tujuan:** untuk mengetahui komunikasi pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat islam di Gampong Bakcirih serta faktor apa yang menghambat komunikasi pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Bakcirih Kecamatan Montasik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. **Hasil/Temuan:** komunikasi pemerintahan antara pemerintah gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Bakcirih Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan menggunakan konsep malayau hasibuan seperti dalam kemitraan, konsultasi, koordinasi, sudah menunjukkan komunikasi yang baik, hanya saja Tuha Peut belum maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat, dan juga dalam pelaksanaan program pemerintahan masih ditemukan masalah dalam pembangunan di gampong. **Kesimpulan:** komunikasi Pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut sudah berjalan dengan baik seperti dalam pembuatan regulasi, pelaksanaan rapat, dan dalam pelaksanaan syariat islam akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan belum diinformasikan dengan baik dan juga dalam kelengkapan administrasi rapat seperti absensi belum diindahkan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang menghambat Komunikasi pemerintahan yaitu sarana, pola Komunikasi, tidak memahami fungsi dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Gampong terkait dengan Fungsi Tuha Peut. Guna meningkatkan komunikasi pemerintahan antara pemerintah gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan Pemerintahan, disarankan diperlukan adanya peningkatan dalam hal perencanaan sehingga tidak ada pemebangunan yang akan tertunda dikarenakan ditolak oleh masyarakat dan juga diperlukannya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Tuha Peut kepada masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan Baik.

Kata kunci: *Komunikasi Pemerintahan, Pemerintah Gampong, Tuha Peut*



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (Kurniawan,2010)

Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik. Dalam pasal 11 Qanun nomor 5 tahun 2003 dijelaskan Dalam structural Gampong Keuchik sebagai kepala dalam mengurus atau mengelola Gampong disebut eksekutif beserta teungku imum, Tengku Imum Meunasah berperan sebagai pimpinan keagamaan, sedangkan Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai legislatifnya Gampong.

Hubungan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut sebagai mitra kerja dimana Tuha Peut sebagai Badan Perwakilan Gampong merupakan wahana dalam mewujudkan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Pemerintah Gampong yang dipimpin oleh keuchik adalah eksekutif gampong dimana sebagai pembuat kebijakan dalam Gampong. apabila Tuha Peut melakukan tugas dan fungsinya dengan baik yang pastinya dalam pelaksanaan pemerintahannya juga akan baik.

Menurut hasibuan (2014), hubungan Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan berjalan baik dapat dilihat dari tiga unsur yaitu kemitraan, konsultatif, dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam pelaksanaan Pemerintahan di Gampong Bakcirih Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sejauh ini sudah baik, akan tetapi dalam pelaksanaan masih ada faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut tidak optimal seperti anggota Tuha Peut jarang ke kantor akibatnya tatap muka dengan keuchik dan Imum meunasah kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan syariat islam dengan anggota Tuha Peut dan Keuchik dan Imum meunasah jarang terjadi. Anggota Tuha Peut sibuk dengan pekerjaan lain.

Karena Tuha Peut selain menjadi anggota Tuha Peut juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota Tuha peut. Sehingga tidak ada anggota Tuha Peut untuk memikirkan kepentingan masyarakat gampong dalam mengkoordinasikan kepada keuchik atau Pemerintah Gampong.

Pengawasan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam pelaksanaan syariat islam masih belum optimal. Salah satunya pelaksanaan syariat bagi pemuda yang diharuskan melaksanakan shalat magrib berjamaah di meunasah. akan tetapi menurut Imum Meunasah yang melaksanakan shalat magrib berjamaah dari tujuh puluh empat orang pemuda yang aktif di Gampong yang melaksanakan kurang dari lima puluh persen, sehingga Tuha Peut dan Pemerintah Gampong perlu melakukan koordinasi dalam upaya untuk penegakan syariat islam sesuai dengan adat masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘‘KOMUNIKASI PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH GAMPONG DAN TUHA PEUT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM DI GAMPONG BAKCIRIH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR ‘‘**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Akibat tatap muka antara pemerintah gampong dan Tua Peut di gampong Bakcirit Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar kurang sehingga mengakibatkan koordinasi dan tukar pikiran diantara keduanya jarang terjadi, krena tugas tuha peut selain menjadi sebagai tuha peut juga memiliki pekerjaan lain selain sebagai tuha peut sehingga perhatian tentang masyarakat berkurang akibatnya koordinasi diantara keduanya pun terhambat.

Pengawasan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam pelaksanaan syariat islam masih belum optimal. Salah satunya pelaksanaan syariat bagi pemuda yang diharuskan melaksanakan shalat magrib berjamaah di meunasah. akan tetapi menurut Imum Meunasah yang melaksanakan shalat magrib berjamaah dari tujuh puluh empat orang pemuda yang aktif di Gampong yang melaksanakan kurang dari lima puluh persen, sehingga Tuha Peut dan Pemerintah Gampong perlu melakukan koordinasi dalam upaya untuk penegakan syariat islam sesuai dengan adat masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Muhammad Ali, dan Antika Widiana yang dilakukan tahun 2018 dengan judul Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Gampong Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah gampong adalah komunikasi yang dijalankan secara langsung seperti musyawarah dusun, musyawarah gampang, rapat-rapat internal dan eksternal.

Kedua, Asmaul Husna yang dilakukan tahun 2017 dengan judul Komunikasi Aparatur Gampong Dalam Mencegah Syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah Hambatan komunikasi yang dihadapi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam, kurangnya komunikasi sesama aparatur Gampong dan masyarakat kurang peduli dengan kasus-kasus seperti itu.

Ketiga, Elfie Mingkid, dan Stefi H. Harilama yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Masyarakat Di Desa Pinapalangko Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 di Desa Pinapalangkow kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah Komunikasi organisasi Pemerintahan Desa Pinapalangkow dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dengan baik karena masih banyak hambatan yang dihadapi.

Keempat, Donesius Dipong, Markus Kaunang, dan Gustaf Unda yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Komunikasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bukutio Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah Masyarakat sulit untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dan merasa ide-ide yang disampaikan tidaklah sesuai dengan keinginan dan harapan dari pemerintah.

Kelima, Azman Sulaiman yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Komunikasi Pemerintahan Gampong Dalam Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah Komunikasi Aparat Gampong dengan Tuha Peut dan tokoh masyarakat lainnya meningkatkan kerjasama dalam melakukan pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat islam di Gampong Bakcirih kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor faktor apa yang menghambat komunikasi pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Bakcirih kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis komunikasi pemerintahan antara pemerintah gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan di gampong Bakcirih menggunakan pendapat dari malayu hasibuan yang menyatakan komunikasi yang baik antara pemerintah gampong dan tuha peut apabila tiga unsur yaitu kemitraan, konsultatif, dan koordinatif sudah terlaksana dengan benar. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Kemitraan

3.1.1 Pembuatan Regulasi

Kemitraan artinya Keuchik dan Tuha Peut memegang prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penegakan syariat islam. Untuk memegang prinsip tersebut maka diperlukan adanya pembuatan regulasi agar kerja sama dapat dijalankan dengan baik.

Kemitraan terjadi karena adanya dua pihak yang bermitra. Pola komunikasi kemitraan yang dilakukan oleh keuchik dan Tuha peut Gampong dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong, karena Tuha Peut dan keuchik Gampong bekerja sama dalam menjalankan tugas Pemerintahan Gampong, dimana setiap perangkat Gampong memiliki tugasnya masing-masing seperti halnya Keuchik yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan gampong sedangkan Tuha Peut memantau, merancaang Qanun Gampong atau peraturan gampong dan tugas dari pemerintah gampong agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Kerjasama yang dilakukan Tuha Peut dan Keuchik dalam pembuatan Regulasi di Gampong Bakcirih Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seperti halnya mengesahkan Anggaran pendapatan Belanja Gampong (APBG) dimana Keuchik yang mengajukan rencana anggaran pendapatan belanja Gampong (RAPBG) dan Tuha yang bertugas mengevaluasinya agar Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Anggaran pendapatan belanja Gampong (APBG) sah untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong setelah disetujui oleh Tuha Peut Gampong. Dalam hal ini keuchik sebagai eksekutif gampong adalah pemimpin dari semua penyelenggaraan pemerintahan di gampong dan juga Tuha Peut selalu mengawasi dari kinerja Keuchik.

3.2 Konsultatif

3.2.1 Konsultasi Rutin

Konsultasi antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut di Gampong Bakcirih sudah berjalan sebagaimana mestinya, seperti setiap bulan melakukan Musyawarah Gampong khusus maupun musyawarah lainnya. Konsultasi rutin yang dilakukan seperti konsultasi tentang pengalokasian anggaran gampong yang disahkan menjadi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong). Dimulai dari perencanaan anggaran gampong untuk pembangunan, penyelenggaraan

pemerintahan, pemberdayaan dan pembinaan dalam Gampong. Setelah dilakukan perencanaan juga adanya pertanggung jawaban dari aparat gampong khusus keuchik yang menjadi pemimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Tuha Peut dan Keuchik selalu mengadakan rapat dan musyawarah setiap bulan bersama untuk menyelesaikan masalah di gampong maupun dalam merencanakan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di gampong agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terlaksana dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong itu sendiri . konsultasi rutin yang dilakukan antara Keuchik dan Tuha Peut juga dapat membuat pemerintahan yang solid dan tujuannya pun dapat tercapai.

3.2.2 Konsultasi Insidentil

Komunikasi antara Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut dalam konsultasi Insidentil biasanya dilakukan karena adanya keperluan yang bersifat urgent atau mendadak sehingga dibutuhkan kerjasama sama pemerintah Gampong Dan Tuha Peut untuk menyelesaikan permasalahan Tersebut. Konsultasi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang bersifat Urgent biasanya dilakukan karena adanya permasalahan sengketa tanah antar warga, dan kegiatan masyarakat lainnya, hal ini senada dengan pernyataan Tuha Peut yaitu Kami Tuha Peut dan Pemerintah Gampong kalau ada permasalahan sengketa tanah dan kegiatan masyarakat lainnya bersifat unrget, pasti akan melakukan rapat untuk mencari solusi. Dalam hal ini Pemerintah Gampong dan Tuha Peut selalu berkerjasama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan Poksi kerja masing-masing.

3.2.2 Koordinatif

3.3.1 Pelaksanaan Program Pemerintahan

Koordinasi antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut terkait program yang dilaksanakan dapat dilihat dari berapa program yang sudah dilaksanakan baik itu program pemerintah pusat atau program pemerintah gampong itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam koordinasi cukup baik hal ini bisa dilihat dari program sosial dan program pembangunan Gampong. Program sosial seperti BLT (Bantuan Tunai Desa) di Gampong Bakcirih telah disalurkan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan sehingga tidak adanya pro kontra dimasyarakat.

Koordinasi program pemerintahan bukan hanya penyelenggaraan pemerintahan saja akan tetapi juga ada pembangunan, dimana pembangunan merupakan salah satu faktor pendukung untuk kemajuan gampong itu sendiri. Dalam hal ini di Gampong Bakcirih masih ada Pembangunan yang belum terselesaikan sehingga menjadi pro kontra di masyarakat. Sehingga pembangunan tersebut akan dilanjutkan Kembali di tahun anggaran berikutnya.

3.3.2 Pelaksanaan Syariat Islam

Secara yuridis, pengaturan penegakan syariat islam di Aceh didasarkan pada undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum penegakan syariat islam di Aceh. Sehingga syariat islam masuk ke pemerintahan yang ada di Aceh sampai ke pemerintahan yang paling bawah atau Pemerintahan Gampong.

Komunikasi pemerintahan antara Pemerintahan Gampong Tuha Peut dalam koordinasi penegakan syariat islam sudah berjalan dengan baik dimana untuk mendukung pelaksanaan syariat islam dibentuknya pengajian seperti pengajian bagi orang dewasa dan pengajian bagi anak-anak, adanya larangan-larangan hal yang menjerumus kemaksiatan seperti berjudi, narkoba di wilayah gampong, Selain itu aturan tentang syariat islam sudah dilaksanakan dengan baik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Muhammad Ali, dan Antika Widiana yang dilakukan tahun 2018 dengan judul Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Gampong Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni metode penelitian sama yaitu metode kualitatif, fokusnya sama dan objeknya penelitiannya sama. Adapun perbedaannya yaitu tujuan penelitiannya berbeda, lokus penelitian berbeda dan juga teori yang digunakan berbeda.

Asmaul Husna yang dilakukan tahun 2017 dengan judul Komunikasi Aparatur Gampong Dalam Mencegah Syariat Islam. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu metode penelitiannya sama yaitu metode kualitatif, fokusnya sama yaitu komunikasi Aparatur Gampong. Sedangkan perbedaannya yaitu tujuan penelitiannya berbeda dan teori yang digunakan berbeda.

Elfie Mingkid, dan Stefi H. Harilama yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Masyarakat Di Desa Pinapalangko Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 di Desa Pinapalangkow kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode penelitiannya sama yaitu metode kualitatif, konsep dan objek penelitiannya sama, sedangkan perbedaannya yaitu tujuan penelitiannya berbeda dan teori yang digunakan juga berbeda.

Donesius Dipong, Markus Kaunang, dan Gustaf Unda yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Komunikasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bukutio Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode penelitiannya sama, dan fokus serta tujuannya sama yaitu untuk mengetahui komunikasi pemerintahan gampong. Adapun perbedaannya yaitu tujuan penelitiannya berbeda, dan teori yang digunakan berbeda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Komunikasi Pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan syariat Islam di Gampong Bakcirih Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Pola komunikasi Pemerintahan berbentuk kemitraan cukup baik yaitu dalam Pembuatan regulasi dimana keuchik dan Tuha Peut seperti mengusulkan, membahas, dan menyepakati Qanun Gampong (peraturan Gampong), Laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan belum diinformasikan secara baik.
2. Pola Komunikasi Pemerintahan berbentuk konsultasi rutin dan insidental cukup baik yaitu Tuha Peut dan pemerintah Gampong sudah melakukan rapat secara rutin, dan juga rapat yang bersifat urgent akan tetapi kelengkapan administrasin rapat seperti absensi sering tidak diindahkan.
3. Pola Komunikasi Pemerintahan berbentuk Koordinasi antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut baik dari pelaksanaan program pemerintahan dan pelaksanaan syariat islam cukup baik,

karena program pembangunan masih ada belum terselesaikan sedangkan pelaksanaan syariat islam sudah baik dimana sudah terlaksananya syariat islam seperti adanya pengajian .

4. Faktor penghambat komunikasi Pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut diantaranya mengenai sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi, dan masyarakat kurang memahami Fungsi dari Tuha Peut dimana Tuha Peut sebagai pelaksana yang seharusnya mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tapi tidak berjalan semestinya seperti yang terdapat dalam Qanun atau undang-undang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi agar bisa memahami dengan baik dalam lingkup kerjanya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Keuchik dan Juga Tuha Peut Gampong Bakcirih Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., 2018. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh*. Banda Aceh. Dinas Syariat Islam.
- Ali, dkk., 2018. “*Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Gampong Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)*”. *Jurnal Jurnalisme* 7(1): 45–65.
- Hasan, Erliana., 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Kaunang, dkk., 2018. “*Komunikasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bukutio Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmera Timur.*” *Jurnal Eksekutif*, 1 (1), 1-11.

Malayu, S.P. Hasibuan., 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Mingkid, dkk., 2018. “*Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa Dalam Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.*” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4 (1): 68–80.

Sulaiman, Azman., 2018. “*Komunikasi Pemerintahan Gampong Dalam Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba.*” *Jurnal Perawi*, 1(2): 49–68.

Sugiono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

